

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara berupaya dalam menyokong pembangunannya ekonomi untuk sesuai dengan arah pembangunan yang mampu menumbuhkan kemakmuran penduduk. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan proses yang meliputi perubahan perstruktur, lembaga, sikap hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakseimbangan pendapatan, serta memberantasi kemiskinan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Dengan terlibatnya pengentasan kemiskinan pada pembangunan ekonomi, maka penting untuk menurunkan kemiskinan dikarenakan sukses atau tidaknya suatu pembangunan kerap diukur dari tingkat kemiskinan yang berubah. Memerangi kemiskinan merupakan tujuan pertama dari beberapa tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana ditandatangani serta disepakati oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia sendiri.

Kemiskinan ialah satu dari berbagai permasalahan yang bisa memperlambat pembangunan ekonomi. Sebagai masalah yang selalu hadir, pemberantasan kemiskinan wajib dilakukan atau paling tidak kemiskinan tersebut dapat berkurang. Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks, yang dimaksudkan bahwa kemiskinan tidak terjadi dengan sendirinya melainkan adanya berbagai faktor yang melatar belakanginya (Mihai et al., 2015), sehingga solusi dalam mengetaskan atas hadirnya kemiskinan dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup aspek-aspek hidup penduduk, serta secara tersusun.

Kemiskinan ialah permasalahan lumrah dialami pada negara berkembang termasuk Indonesia, namun tidak hanya negara berkembang, masalah kemiskinan juga dihadapi oleh negara-negara maju. Indonesia sendiri termasuk negara berkembang yang dihadapkan dengan permasalahan tersebut yang tidak dapat diabaikan. Kemiskinan selalu menjadi masalah yang masih susah untuk dituntaskan sepanjang tahun di Indonesia, terlebih ketika terjadinya Covid-19

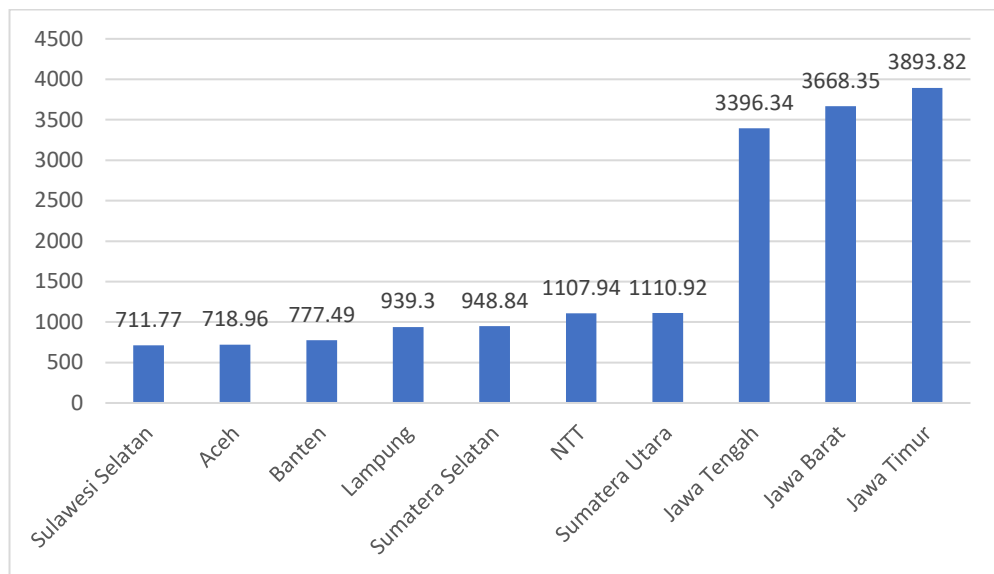
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek di negara. Menurut BPS dalam mengukur kemiskinan tersebut digunakan kemampuan dalam kebutuhan dasar yang terpenuhi.



Grafik 1.1 Kemiskinan Indonesia 2015-2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah (2026).

Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi yang tersebar pada berbagai pulau, Indonesia menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang eksklusif dan merata serta mengatasi kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia memiliki tren yang menurun pada tahun 2015-2024. Namun, pada saat Covid-19 melanda, tingkat kemiskinan meningkat pada 2020-2023. Meskipun memiliki tren penurunan, penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024 masih sebesar 8.57%, sementara 155,64 juta jiwa diantaranya tinggal di pulau Jawa yang mana separuh total penduduk Indonesia berada di pulau Jawa.



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Menurut Provinsi di Indonesia 2024 (Ribuan Jiwa)

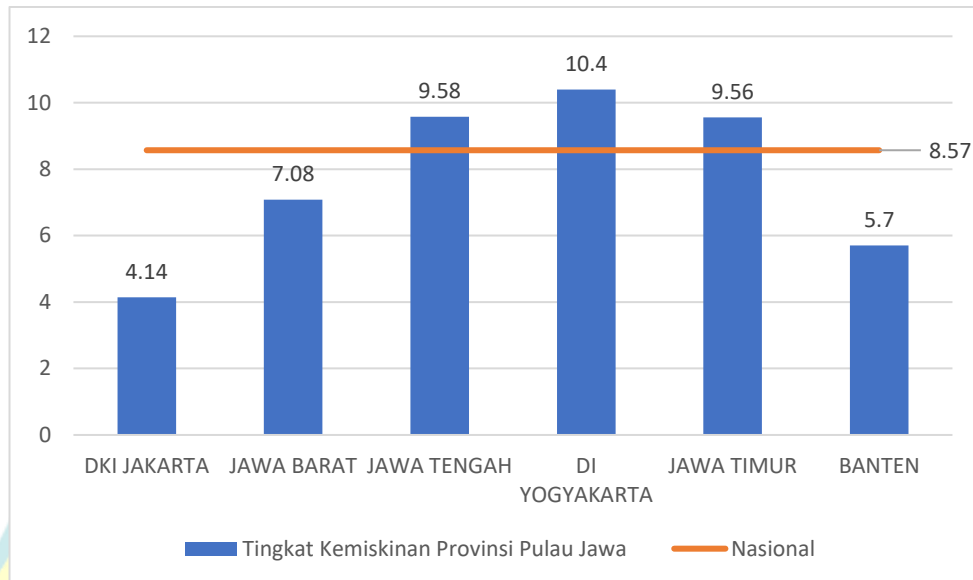
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah (2026).

Dari gambar 1.1 terlihat provinsi yang mempunyai banyak penduduk miskin yang tertinggi berdasarkan provinsi di Indonesia. Terdapat tiga provinsi di pulau Jawa yang menjadi provinsi dengan proporsi penduduk miskin tertinggi di Indonesia pada 2024, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan perbedaan jumlah yang sangat timpang dengan provinsi lainnya.

Dalam kesepuluh provinsi yang memiliki proporsi penduduk miskin terbanyak pada periode 2024, tiga provinsi tertinggi diduduki oleh provinsi di pulau Jawa. Banten yang termasuk dari satu dari keenam provinsi di pulau Jawa juga hadir dalam proporsi penduduk miskin terbanyak dalam urutan kedelapan dari sepuluh provinsi proporsi penduduk miskin tertinggi di Indonesia periode 2024.

Proporsi penduduk miskin pada peringkat pertama sampai ketiga yang diduduki oleh ketiga provinsi di pulau Jawa memiliki ketimpangan yang dua kali lipat lebih dibanding provinsi urutan keempat sampai urutan kesepuluh yaitu, Sumatera Utara, NTT, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Hal tersebut terlihat bahwa proporsi penduduk miskin

terbanyak pada provinsi di Indonesia dipegang oleh provinsi di pulau Jawa dengan jumlah yang besar.

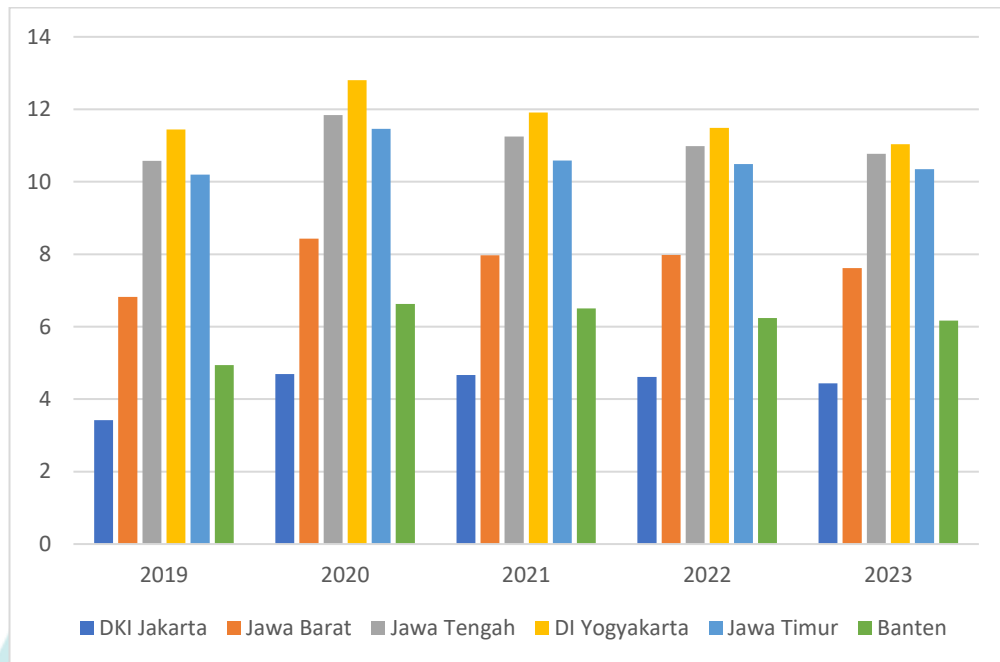


Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Pulau Jawa 2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah (2026).

Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Dari Gambar 1.2, provinsi di pulau Jawa hadir dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional di tahun 2024, yang mana provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tingkat kemiskinan tiga provinsi tersebut melampaui tingkat kemiskinan nasional tahun 2024 yang sebesar 8,57%.

Selain itu, pulau Jawa menjadi penyumbang sebesar 57,05% atau lebih dari separuh PDB nasional. Pembangunan ekonomi juga berlimpah disumbangkan di pulau Jawa dan sekitarnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Meskipun pulau Jawa merupakan pusat perekonomian, permasalahan kemiskinan juga masih terkonsentrasi di pulau Jawa yang mana persentase penduduk miskin dan proporsinya juga besar. Oleh karena itu, kemiskinan di Pulau Jawa menjadi pilihan topik yang menarik untuk diteliti.



Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Pulau Jawa 2019-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah (2026).

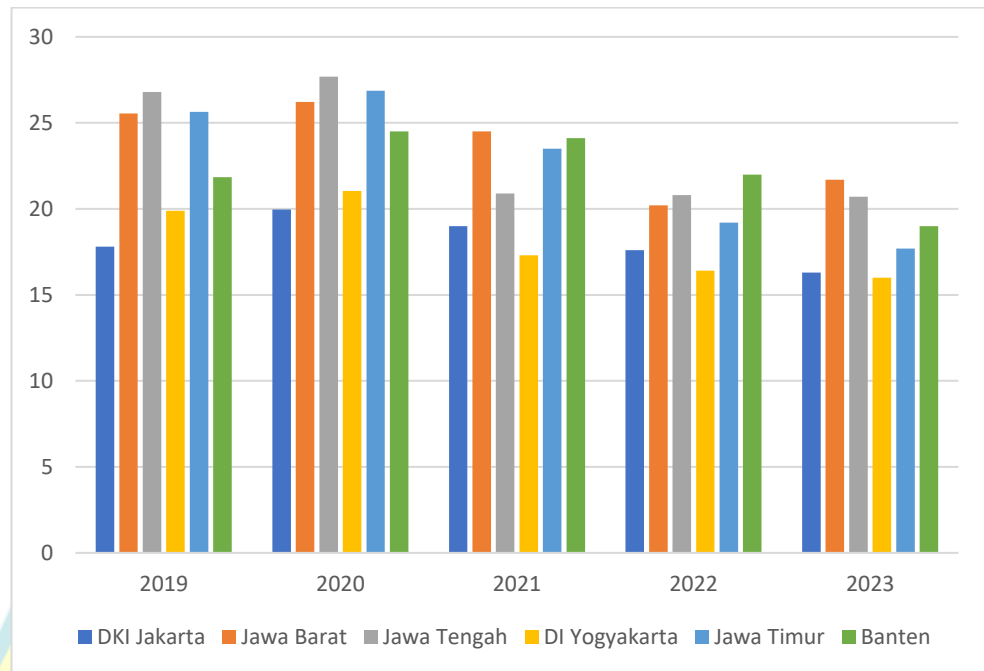
Secara spasial, kemiskinan masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Pulau Jawa ialah pulau besar yang mempunyai pertumbuhan PDRB tertinggi namun tingkat kemiskinannya masih berada di angka mendekati 10%. Dapat dilihat terjadinya peningkatan tingkat kemiskinan di tahun 2020-2023. Menurut laporan dari *World Bank Organization* (2020), pandemi Covid-19 adalah guncangan yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan global yang pertama dan mengakibatkan kondisi yang selama ini berjalan baik menjadi berbalik arah. Sama halnya dengan yang dihadapi pulau Jawa yang juga menjadi daerah yang hadir dengan masalah Covid-19 tertinggi di Indonesia pada masanya. Pada saat pandemi Covid-19 melanda, pemerintah menetapkan berbagai peraturan terbaru untuk bisa menekan penyebaran Covid-19, seperti pembatasan sosial, pembelajaran jarak jauh, *lockdown*, dan sebagainya. Hal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek termasuk perekonomian, pendidikan, beserta kesehatan.

Menurut Ishartono & Raharjo (2016), di Indonesia kemiskinan adalah permasalahan yang berulang yang terjadi dari masa ke masa dan masih menjadi permasalahan yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan

kemiskinan rutin disangkutpautkan dengan ketidakseimbangan yang terjadi pada masyarakat, yakni hadirnya ketidaksamaan antara masyarakat kaya dengan masyarakat yang miskin (Adhitya et al., 2022). Dibuktikan sumber data BPS yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan melalui rasio gini, provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat adalah provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia pada tahun 2024, yang mana ketiga provinsi tersebut termasuk bagian dari pulau Jawa.

Sebagaimana diketahui bahwa meningkatnya kemiskinan adalah masalah serius di negara-negara seluruh dunia dimana akses terhadap sumber daya manusia adalah faktor penting dalam hal menuntaskan kemiskinan ini. Kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara sebab berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Angka kemiskinan ditentukan oleh beberapa faktor utama, seperti ketidakmampuan untuk mendapatkan dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta akses terbatas dalam pendidikan dan kesehatan. Menurut Todaro (2009) untuk mencapai kebahagiaan, kesehatan sangat penting. Tingkat gizi merupakan salah satu indikator pengukuran dalam kesehatan. Pada saat ini, stunting masih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam permasalahan gizi pada anak. Tingkat gizi menggambarkan pemenuhan aspek kesehatan yang dimiliki oleh individu dalam kehidupannya. Seseorang dengan tingkat kesehatan yang baik cenderung akan mempunyai produktivitas kerja yang optimal, keberhasilan dalam pendidikan, dan akan mempengaruhi kesejahteraannya. Tingkat kesehatan akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan mempunyai hubungan yang kuat terhadap kemiskinan (Suryandari, 2018).

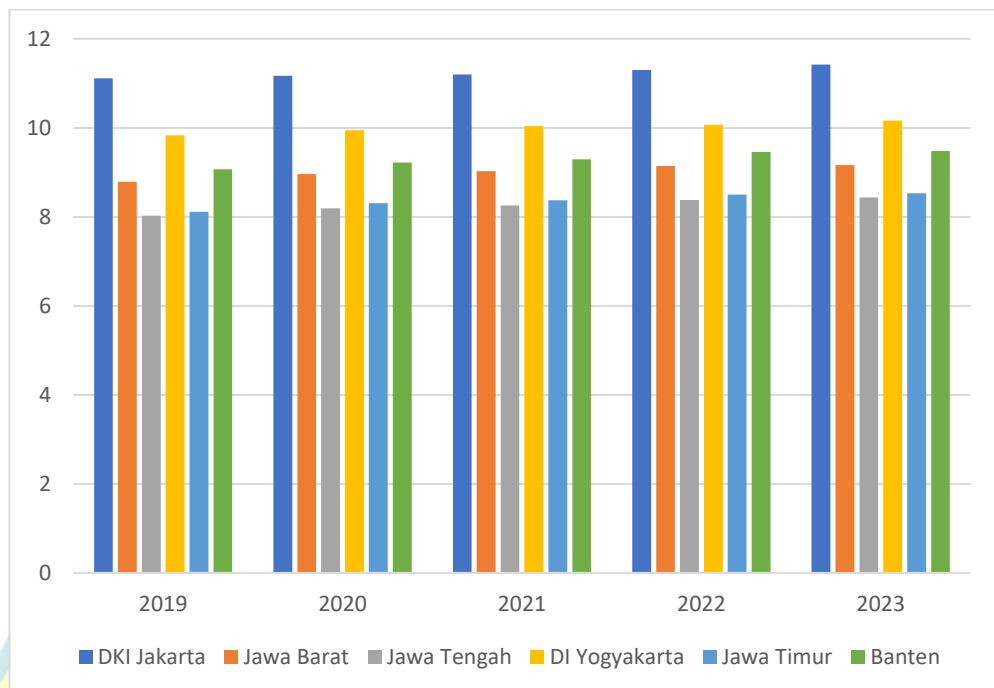


Gambar 1.4 Tingkat Stunting Pulau Jawa 2019-2023 (%)

Sumber: Kementerian Kesehatan, data diolah (2026).

Dari gambar 1.3 dapat ditarik benang merah, tingkat stunting di pulau Jawa yang terdiri atas enam provinsi memiliki tren fluktuatif dari tahun 2019-2023. Rata-rata tingkat stunting terendah berada di provinsi DKI Jakarta dengan tingkat sebesar 11.05%, sedangkan provinsi dengan rata-rata tingkat stunting tertinggi adalah Jawa Barat sebesar 14.77%.

Faktor lain yang memiliki pengaruh atas hadirnya kemiskinan di suatu daerah ialah faktor pendidikan. Penelitian Eric & Afdal (2025) menemukan bahwa pendidikan berdampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan dalam pendidikan dapat meningkatkan produktivitas seseorang dan memungkinkan akses untuk peluang kerja yang lebih baik. Artinya, semakin tinggi seseorang berpendidikan, maka akan turut serta memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi, maka pada akhirnya terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Rata-rata lama sekolah ialah salah satu tolok ukur yang dipakai dalam melihat seberapa besar kualitas penduduk atas pendidikan formal yang diselesaikan. Berikut ini rata-rata lama sekolah pada enam provinsi di pulau Jawa.



Gambar 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pulau Jawa 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah (2026).

Dari gambar di atas dapat ditarik benang merah bahwa rata-rata lama sekolah di pulau Jawa pada periode lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Dari keenam provinsi di pulau Jawa, DKI Jakarta yang memiliki rata-rata lama sekolah terpanjang, sedangkan Jawa Tengah adalah provinsi dengan rata-rata lama sekolah terpendek. DKI Jakarta selalu menjadi provinsi dengan rata-rata lama sekolah tertinggi dalam setiap tahun pada 2019-2023, dengan rata-rata lama sekolah ialah lebih dari 10 tahun.

Menurut Hadi (2019) dalam penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki dampak yang negatif terhadap persentase penduduk miskin. Artinya, apabila seorang mengenyam pendidikan dengan jangka waktu yang lama tidak akan mendekatkan dirinya sendiri dari garis kemiskinan. Sebaliknya, seseorang dengan pendidikan singkat akan dekat dengan garis kemiskinan. Hal ini didukung atas apa yang dikemukakan oleh Mankiw (2012), setiap tahun yang dipakai individu untuk berpendidikan (tingkat lama sekolah) akan menaikkan gaji yang diperolehnya. Gaji yang meningkat ini akan mendukung peningkatan kesejahteraan seseorang dan

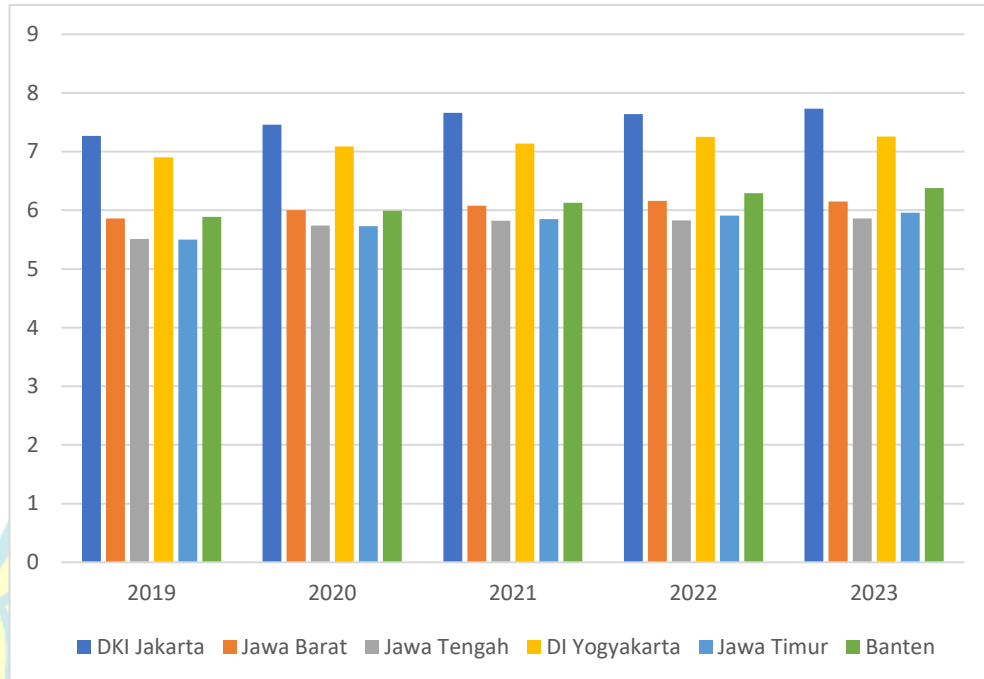
menjauhinya dari kemiskinan. Namun, tidak selaras dengan hasil penelitian Mindayanti et al., (2021) yang mana menunjukkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan cukup lebih memilih keterampilan yang tepat dengan pekerjaan, sehingga peningkatan pendidikan tidak berpengaruh terhadap mengurangi kemiskinan.

Selain banyak penelitian yang menjelaskan hubungan pendidikan terhadap kemiskinan, terdapat pula banyak komponen dalam penelitian empiris terkait yang memengaruhi tingkat kemiskinan dengan hasil yang bervariasi. Salah satunya, kemajuan teknologi memiliki dampak perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang yang akan berpengaruh pada produktivitas output yang dihasilkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Lestari & Rahmawati, 2021). Menurut Todaro & Smith (2009), salah satu cara untuk menekan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi adalah dengan adanya menggunakan teknologi yang tepat dan membangun infrastruktur yang memadai. Sehingga, faktor lain yang dapat berketerlibatan atas kemiskinan adalah teknologi informasi dan komunikasi.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan standar dalam mengukur kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah yang mampu mengukur ketimpangan digital antarwilayah, serta mengukur pertumbuhan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang dirilis oleh BPS. Indeks ini dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* yang mengacu pada *ICT Development Index*.

Berdasarkan kategori Penilaian IP-TIK dikategorikan atas empat tingkat, yaitu tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50). Keenam provinsi di pulau Jawa memiliki rata-rata IP-TIK dengan kategori sedang. DKI Jakarta memiliki nilai rata-rata IP-TIK tertinggi diantara keenam provinsi di pulau Jawa yaitu sebesar 7,43, lalu diikuti DI Yogyakarta dengan nilai indeks 6,76, selanjutnya Banten dengan nilai indeks 5,75, Jawa barat dengan nilai indeks 5,61, Jawa Timur dengan nilai

indeks 5,33, dan Jawa Tengah dengan nilai indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 5,26.



Gambar 1.6 Indeks Pembangunan TIK pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah (2026).

Berdasarkan kategori indeks pembangunan TIK, dari gambar di atas menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di pulau Jawa dalam lima tahun terakhir memiliki tren meningkat. Dimana DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IP-TIK paling tinggi di setiap tahunnya dengan mayoritas indeks berada di angka indeks tujuh, sementara Jawa Tengah menjadi provinsi dengan indeks pembangunan TIK paling rendah yang angka indeksnya bahkan tidak sampai angka enam selama periode 2019-2023 di pulau Jawa.

Selain itu, penelitian Rani & Fitri (2024) menemukan bahwa TIK mempunyai dampak dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mewujudkan TIK sebagai keperluan yang penting atas strategi dalam pembangunan yang lebih menyeluruh untuk memnberantas kemiskinan. Penelitian Khoirunnisa & Winih (2019) juga memperlihatkan bahwa IP-TIK berpengaruh negatif yang

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Lain hal pada penelitian Fatmawati & Aisyah (2023) menemukan bahwa TIK tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hadirkan peran penting dalam pengupayaan penurunan kemiskinan, terutama di daerah seperti pulau Jawa yang memiliki tingkat penetrasi digital tinggi. Namun, dalam memaksimalkannya, diperlukan adanya peningkatan baik dari segi infrastruktur fisik telekomunikasi maupun penggunaan TIK serta upaya penyuluhan atau literasi, terutama di daerah yang kurang berkembang teruntuk masyarakat miskin agar berkenan dan mampu memanfaatkan TIK sehingga bisa meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menanggapi permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pengaruh kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, dan covid-19 terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penyempurnaan dari studi sebelumnya karena menggunakan variabel dan data yang lebih terbaru dengan rentang waktu 2015-2024 serta mencakup wilayah yang diteliti, yaitu pulau Jawa yang terdiri dari keenam provinsi di pulau Jawa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kesehatan, Pendidikan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kemiskinan di pulau Jawa Dengan Covid-19 Sebagai Variabel Dummy Tahun 2015-2024 ”.**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan didasarkan pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di pulau Jawa?
2. Apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di pulau Jawa?
3. Apakah terdapat pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kemiskinan di pulau Jawa?

4. Apakah terdapat pengaruh covid-19 terhadap kemiskinan di pulau Jawa?
5. Apakah terdapat pengaruh kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, dan covid-19 berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di pulau Jawa
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di pulau Jawa
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kemiskinan di pulau Jawa
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh covid-19 terhadap kemiskinan di pulau Jawa
5. Mengetahui apakah terdapat pengaruh kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, dan covid-19 berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di pulau Jawa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi pihak universitas, khususnya Universitas Negeri Jakarta, sekaligus menjadi tambahan untuk referensi yang tersedia di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, terutama mengenai dampak

kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, dan covid-19 terhadap kemiskinan di pulau Jawa.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman terkait cara penulisan yang baik bagi peneliti, serta bisa dijadikan modal pembelajaran berharga jika terjun di masyarakat untuk dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

1.5 Batasan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, agar lebih terfokus, maka penelitian ini membatasi pada pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

